PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD ARSYAD**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN LAYANAN AKADEMIK**
3. NHK : **968452**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.980.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PINRANG, Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA PINRANG, Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 92.000.000**

1. MOBIL, DATSUN DATSUN GO PANCA/MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BZY A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 55.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 54.356.556**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**100.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**2.281.356.556**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**876.015.956**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.405.340.600**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.